

IMPLEMENTASI *E-GOVERNMENT* DI KABUPATEN WONOSOBO

Mega Hayuning Puspa Dewi , Susi Sulandari , Dewi Rostyaningsih

Administrasi Publik , Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jl.Prof Soedharto SH, Kampus Tembalang , Semarang

Email : megahayuningpuspadewi@gmail.com

Abstrak

Kebijakan *E-government* mengacu pada Instruksi Presiden No 3 Tahun 2003 yang mewajibkan seluruh jajaran pemerintahan dari Menteri dan Pemerintah Daerah , selain itu terdapat *blueprint e-government* seperti meningkatkan mutu layanan publik melalui teknologi IT, terbentuknya pemerintahan yang bersih , transparan dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan perbaikan organisasi, sistem manajemen dan proses kerja pemerintahan. Salah satunya dengan pembuatan *website* pemerintah daerah. Pada kenyataannya di Kabupaten Wonosobo ini *website* belum di gunakan dengan maksimal, terbukti dengan banyak *link* yang kosong, sehingga informasi yang di berikan tidak maksimal.

Dalam melihat implementasi *e-government* di Kabupaten Wonosobo ini dilihat dari pertama tujuan yang terbagi *output* dan *impact* dan yang kedua adalah proses. Proses implementasi *e-government* dalam mencapai tujuannya tidak terlepas dari faktor yang mempengaruhi kebijakan ini. Berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn disimpulkan faktor menghambat berupa sumberdaya, komunikasi, disposisi, lingkungan eksternal.

Penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif. Dengan memilih informan yang dianggap paling tahu (*non probability sampling*) yang kemudian menggunakan *snowballsampling*. Yang nantinya penelitian ini berusaha menggambarkan permasalahan yang ada dan menganalisanya pada suatu kesimpulan yang absolut.

Pada implementasi *e-government* di Kabupaten Wonosobo ini, pengadaan *website* sudah diadakan sejak tahun 2009, namun banyaknya *link-link* yang kosong menjadikan dampak / manfaat yang dihasilkan kurang maksimal. Hal ini disebabkan oleh sumberdaya manusia yang kurang, disposisi implementor, dan lingkungan eksternal.

Berdasarkan hasil yang ada dalam implementasi kebijakan *e-government* di Kabupaten Wonosobo dilihat tujuan dan proses-nya kebijakan ini kurang maksimal dan masih perlu pembenahan. Penulis memberikan rekomendasi berupa

: (1) penambahan jumlah staff yang sesuai (2) sosialisasi agar masyarakat tahu tentang kebijakan ini (3) penambahan anggaran untuk alokasi kebijakan *e-government* (4) meningkatkan komitmen implementor (5) membuat akun lain di sosial media agar meningkatkan partisipasi masyarakat.

Kata kunci : implemementasi , Instruksi presiden, *Blue print*, *e-government* , proses, faktor penghambat

Abstract

Policy e-government reference to presidential instruction no 3 / 2003 which requires the whole range of minister for government and regional governments moreover, there were blueprint e-government program as improve the quality of public services, melalui technology it the emergence of pemerintahan clean, transparent and able to answer charges change by effective and repairs organization, a system of management and the process of working pemerintahan. One of them by making website of the local government. In fact in the county of wonosobo this website, not in use to the utmost proven links with a lot of empty so that the information in give not optimal.

In seeing the implementation of e-government district wonosobo is seen from first shared purpose output and impact and the second was process. The implementation of e-government in achieving its goal not regardless of factors affecting this policy. Based on theories van meters and van horn inferred factors impeding of resources, communication disposition, external environment.

The research used by the researchers is the kind of qualitative descriptive study. By selecting informants considered the most know (non probability sampling), then use the snowball sampling. Later this research attempts to describe the existing problems and analysing a conclusion which is absolute.

On the implementation of e-Government in Wonosobo Regency, procurement website has been held since in 2009, but the number of empty links make an impact/benefits generated insufficient. This is caused by a lack of human resources, implementor, disposition and the external environment.

Based on the results of the implementation of the e-government policy in Wonosobo Regency views his purpose and process of this policy is insufficient and will still need revamping. The authors provide recommendations in the form of: (1) the addition of the appropriate number of staff (2) socialization in order for the community to know about this policy (3) additions to the budget allocation for the e-government policy (4) enhance the commitment of the implementor (5) create other accounts on social media in order to increase public participation.

Keyword : implementation , presidential instruction , blueprint, e-government process, hindering factors

1. PENDAHULUAN

Pelaksanaan kebijakan *e-government* di Kabupaten Wonosobo sudah berjalan semenjak tahun 2004, penggunaan website sebagai salah satu wujud dari *e-government* dimulai semenjak 2009, namun sampai sekarang masih kurang sempurna di dalam pelaksanaan kebijakan ini, seperti dalam *website* ini banyak kekurangan, diantaranya konten-konten yang kurang menurut acuan panduan penyelenggaraan *website* pemerintah daerah yang di keluarkan oleh Kementrian Komunikasi dan Infomatika. Dimana isi minimal website yaitu selayang pandang, pemerintah daerah, geografis, peta wilayah dan sumberdaya, peraturan/kebijakan daerah, buku tamu dan berita. Penting nya isi dari *website* karena ini merupakan konsumsi publik yang sudah diatur dalam UU no 14 tahun2008 ,selain itu sebagai salah satu bentuk transparansi dan media komunikasi dengan masyarakat.

Berdasarkan gejala permasalahan tersebut penulis merasa perlu dilakukan suatu kajian tentang implementasi *e-government* di Kabupaten Wonosobo. Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi *e-government* di Kabupaten Wonosobo, untuk melihat apa saja yang mempengaruhi dari implementasi ini dan untuk mengetahui solusinya, yang harapannya dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan yaitu untuk merekonstruksi teori-teori sehingga dapat memberikan kontribusi dalam mengimplementasikan teori-teori yang telah ada dan dapat menambah kepustakaan tentang *e-government* di Indonesia secara umumnya. Sedangkan secara praktis dapat dijadikan masukan bagi instansi terkait untuk memperbaiki implementasi *e-government* di Kabupaten Wonosobo serta memberikan informasi bagi bahan informasi bagi peneliti lain dalam meneliti permasalahan terkait di masa yang akan datang.

Berdasarkan pertanyaan dan tujuan penelitian ini mengacu pada teori implementasi kebijakan publik. Untuk melihat implementasinya menggunakan pengertian yang diungkapkan oleh para ahli sehingga peneliti menyimpulkan implementasi dilihat dari 2 unsur yaitu tujuan yang akan dicapai dan proses. Sedangkan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi *e-government* di Kabupaten Wonosobo berdasarkan teori van Meter dan van Horn yang relevan dengan kebijakan ini yakni sumberdaya, komunikasi, kondisi sosial , ekonomi dan politik serta disposisi implementor.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian implementasi *e-government* di Kabupaten Wonosobo menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian

deskriptif bertujuan untuk menggambarkan suatu gejala sosial tertentu dengan cara membandingkan gejala yang ditemukan. Sehingga penelitian kebijakan *e-government* ini merupakan penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Adapun, situs penelitian implementasi kebijakan *e-government* di Kabupaten Wonosobo yakni Humas Setda Kabupaten Wonosobo dan masyarakat sekitar yang menjadi sasaran dari kebijakan ini.

Penelitian ini menggunakan *nonprobability*, yaitu teknik pengambilan informan dipilih karena tidak acak seperti kesesuaian informan dengan kriteria-kriteria yang dirumuskan peneliti. Peneliti tidak memilih informan secara random tetapi memilih beberapa informan yang diyakini mampu memberikan informasi yang dibutuhkan. Sedangkan dalam menganalisa perkembangan informasi maupun sumbernya menggunakan prinsip *snowball sampling* (sampel bola salju) yaitu teknik penentuan informan yang mula-mulanya kecil, kemudian informan ini semakin besar cakupannya sehingga yang digunakan akan lebih banyak. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Humas Setda Kabupaten Wonosobo, Adminisrator *website* dan masyarakat.

Setelah informan ditentukan maka langkah selanjutnya adalah menentukan sumber data dan teknik pengumpulan data yang dilakukan. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer yaitu data yang berupa teks hasil wawancara dan diperoleh melalui wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sampel dalam penelitian. Sedangkan data skunder data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat atau mendengarkan. Data-data tersebut dapat dikumpulkan melalui beberapa cara yaitu dokumentasi, wawancara mendalam, observasi dan studi pustaka.

Data yang sudah dikumpulkan kemudian dilakukan analisis dan interpretasi data yaitu melalui reduksi data yakni data yang diperoleh dipilah sesuai dengan kebutuhan, kemudian data yang sudah dipilah disajikan yang pada akhirnya ditarik kesimpulan atas jawaban-jawaban yang diberikan informan. Adapun untuk pengujian keabsahan datanya, pada penelitian ini dilakukan dengan satu cara, yaitu triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Terdapat tiga jenis triangulasi, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan ketiga triangulasi tersebut. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dari lapangan melalui beberapa sumber. Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Pengecekan dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan triangulasi waktu dilakukan dengan cara mengecek data dengan lokasi yang sama tetapi waktu yang berbeda.

PEMBAHASAN

2.1 Implementasi *e-Government* di Kabupaten Wonosobo

2.1.1 Tujuan Implementasi

Tujuan kebijakan *e-government* di Kabupaten yaitu dengan pengadaan *website* ini sudah berjalan selama 4 tahun. Selain menggunakan media *website*, Pemerintah Kabupaten Wonosobo juga menggunakan radio dan yang lainnya sebagai media informasi publik. Walaupun pihak implementor menyetujui bahwa banyak manfaat seperti mengangkut aspirasi masyarakat, lebih mendekatkan diri kepada masyarakat, dengan media *website* ini masyarakat jadi lebih tahu dan mengerti bagaimana keadaan Kabupaten Wonosobo sebenarnya, kemudian bisa menjadi salah satu alat untuk transparansi publik. Namun meskipun banyak manfaat yang akan didapat pada implementasi *e-gov* ini kenyataan pada implementasinya wacana untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat hanya isapan jempol. Pasalnya tidak ada “ruang” bagi masyarakat untuk menuangkan aspirasinya. Kemudian informasi-informasi di dalam *website* juga masih kurang. Menu utama seperti selang pandang, geografis, pemerintah kabupaten, kebijakan daerah, peta wilayah dan sumberdaya, berita dan buku tamu akan tetapi masih banyak *link-link* yang kosong, hanya selang pandang dan berita saja yang sudah komplit. Maksud dari *link-link* yang kosong adalah memang sudah terdapat *link*. Misal *link* “peta wilayah dan sumber daya” akan tetapi ketika di klik *link* itu *link* eror jadi kita tidak bisa menemukan informasi yang kita butuhkan. Ada lagi *link* perda/peraturan daerah yang di *website* juga *link* kosong.

2.1.2 Proses

Proses yang panjang dimulai dari tahun 2004 *e-government* di kelola oleh Kantor Arsip dan Pengolahan Data Elektronik sampai tahun 2008. Setelah dikelola selama 4 tahun, menemui kendala minimnya jaringan infrastruktur dan kondisi geografis kabupaten Wonosobo. Pada tahun 2006 Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan menggunakan aplikasi SIMPUS (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas) yang ternyata bisa meng-cover 22 puskesmas yang tersebar di 15 kecamatan di Kabupaten Wonosobo. Setelah itu Perda No 16 tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelembagaan menetapkan tugas pengelolaan *e-gov* pada Sub-bag Pengelolaan Data Elektronik Humas Setda Kabupaten Wonosobo, sebagian ada di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi dan secara fisik berada di Bappeda. Hal ini membuat pengembangan *e-gov* semakin tidak jelas. Pada tahun 2012 baru diinisiasi oleh Sub bag PDE, dinas terkait dan PNS yang berkomitmen membentuk TIM Pemberdayaan TIK kabupaten Wonosobo untuk menjadikan *e-gov* di Kabupaten Wonosobo lebih optimal. Kemudian pada pelaksanaan pengunggahan berita, seperti yang dikatakan tadi telah terbentuk tim

dengan tugasnya masing-masing, wartawan yang bertugas meliput berita kemudian menyerahkan kepada sub bag PDE yang nantinya berita tersebut diolah dan bisa diunggah ke dalam *website* Pemerintah kabupaten Wonosobo.

Berdasarkan wawancara diatas setelah Inpres no 3 tahun 2003 dikeluarkan, pemerintah Kabupaten Wonosobo baru melaksanakan kebijakan ini setelah satu tahun. Dan baru menggunakan *website* pada tahun 2009 , memang cukup panjang waktunya. Dalam proses nya juga mengalami masa-masa sulit, namanya juga kebijakan baru dan hal baru. Pasti membutuhkan proses yang lumayan lama. Tapi melihat proses yang panjang yang dilakukan pemerintah Kabupaten Wonosobo, peneliti melihat ada upaya pemerintah kabupaten wonosobo untuk mengembangkan *e-gov* ini. Dimulai dari 4 tahun di Kantor Arsip dan Pengolahan Data Elektronik belum mencapai hasil yang maksimal. Kemudian Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan yang menemukan titik cerah dalam *e-gov* di Kabupaten Wonosobo ini nyatanya Sistem Informasi Manajemen Puskesmas bisa menghubungkan 22 Puskesmas yang tersebar di 15 kecamatan yang menjadi semangat baru untuk Pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk lebih mengembangkan *e-gov* ini, sampai pada akhirnya keluarlah Perda No 16 tahun 2008 tentang struktur organisasi dan tata kelembagaan yang menetapkan tugas pengelolaan *e-gov* ke sub-bag Humas Setda Kabupaten Wonosobo namun masih terbagi oleh Bappeda dan Dinas Perhubungan , Komunikasi dan Informasi, akhirnya malah membuat *e-gov* semakin membingungkan , kemudian pada tahun 2012 sub-bag menginisiasi membentuk Tim yang ada hingga saat ini. Perjalanan panjang ini membuktikan bahwa pemerintah kabupaten wonosobo terus mengupayakan *e-gov* ini sebagai kebijakan yang harus dijalankan dan agar tidak sia-sia.

Dilihat dari awal peneliti meneliti *website* Kabupaten Wonosobo dari tahun 2012, sering berganti-ganti *lay-out*, hingga akhir tahun kemarin pada Desember 2013, setahu peneliti sudah berganti *lay-out* sebanyak 3 x. Yang akan dibahas disini bukan design *lay out* nya karena itu bukan bidang peneliti. Yang akan peneliti bahas adalah dari perubahan ke 3 kalinya itu di dalam konten tidak ada perubahan sama sekali. Tidak ada penambahan konten misalnya profil pemerintahan daerah atau kebijakan. Hanya saja wajah yang berganti namun isinya sama saja. Bahkan ketika kemarin tanggal 3 Februari 2014 *website* kabupaten Wonosobo mati total dan tidak dapat diakses. Alasan daripada pihak implementor masih dalam tahap perbaikan-perbaikan dan kontennya belum bisa dilihat awal maret 2014.

2.2 Faktor yang mempengaruhi implementasi e-government

Dari hasil uraian diatas, masih banyak kekurangan-kekurangan didalam implementasi e-government di Kabupaten Wonosobo disebabkan oleh hal-hal berikut di bawah ini :

1. Sumber Daya
Sumber daya manusia yang ada didalam Humas Setda Wonosobo belum sesuai dengan latar belakang pendidikan Sumber daya finansial hanya berasal dari APBD 2014 dan dinilai kurang. Fasilitas yang ada juga masih kurang dikarenakan Kabupaten Wonosobo merupakan daerah pegunungan yang membutuhkan rekayasa jaringan yang kompleks dan wilayahnya masih riskan petir.
2. Komunikasi internal untuk implementasi ini baik, karena implementor paham dan jelas mengenai kebijakan ini, namun komunikasi eksternal yaitu untuk pengenalan website ini ke masyarakat masih kurang terbukti dengan masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui tentang kebijakan ini.
3. Disposisi implementor, kurangnya komitmen dan kemauan implementor dalam pelaksanaan kebijakan ini, karena permasalahan yang ada atau kesulitan yang dihadapi masih sama saja seperti yang dihadapi oleh tahun-tahun sebelumnya, dan dari tahun 2009, informasi yang tertuang di dalam website juga masih sama, informasinya masih kurang. Masih banyak terdapat *link-link* yang eror, sehingga tidak bias menemukan informasi yang diinginkan.
4. Lingkungan eksternal, untuk lingkungan ekonomi yaitu berhubungan dengan PAD Kabupaten Wonosobo yang masih tergolong rendah sehingga membuat APBD menjadi kecil dan alokasi anggaran tahun ini masih focus kepada penanggulangan orang miskin dan pelayanan sosial. Untuk lingkungan social, berdasarkan statistic Kabupaten Wonosobo social masyarakatnya masih rendah, hanya sebagian masyarakat yang bisa mengoperasikan komputer dan mengakses internet. Lebih sukanya masyarakat membuka akun social media daripada membuka website resmi pemerintah daerah seperti facebook. Kemudian ditemukannya website saingan yang mana juga membahas tentang kabupaten Wonosobo. Website saingan ini juga mempunyai akun social media di facebook dan twitter. Dan keduanya lebih interaktif

3 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Implementasi di Kabupaten Wonosobo belum berjalan dengan baik, apa bila dilihat dari:

1. Tujuan implementasi kebijakan, yang meliputi *output* dan *impact* ini untuk *output* kebijakan ini adalah membuat *website* yang sudah dilaksanakan dari tahun 2009, namun belum sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, seperti *website* sebagai media informasi dan transparansi,

sebagai tempat untuk menuangkan aspirasi masyarakat. Di dalam *website* tersebut belum ada “ruang” bagi masyarakat untuk menuangkan aspirasinya dan banyak *link-link* yang kosong/*error*. Sehingga pemanfaatan dari *website* ini (*impact*) Baik pemerintah maupun masyarakat kabupaten Wonosobo belum merasakan secara maksimal manfaat dari adanya *website* ini.

2. Proses sejarah panjang yang dilalui perjalanan *e-gov* ini. Dimulai dari tahun 2004 yang sempat berpindah-pindah pengelola *e-gov* dari Kantor Arsip dan Pengolahan Data, Bappeda, Dinas Perhubungan dan Komunikasi hingga dari tahun 2012 sampai sekarang ditangani oleh Humas Setda Kabupaten Wonosobo dengan membentuk Tim Pemberdayaan TIK. Walaupun sudah berpindah-pindah pengelola, hingga tahun 2014 ini Humas Setda menggunakan jasa *outsourcing* untuk pemeliharaan jaringan dan pengelolaan *software*. Namun masih sama saja belum menunjukkan *progress* yang diharapkan seperti konten-kontennya lengkap. Dan *website* ini bermanfaat sebagai media transparansi dan media komunikasi.
3. Implementasi *e-gov* di Kabupaten Wonosobo ini belum berjalan dengan baik tentu ada hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kebijakan ini. Hambatan-hambatan implementasi *e-gov* ini yaitu :
 1. Sumberdaya Manusia, dimana staff-staff yang ada didalam Humas Setda Kabupaten Wonosobo ini masih kurang berkompeten dibidangnya
 2. Sumberdaya Finansial, anggaran yang ditetapkan dari APBD 2014 untuk kebijakan ini belum bisa meng-cover kebutuhan-kebutuhan kebijakan *e-government*.
 3. Fasilitas, diawali dengan finansial yang belum memadai maka fasilitas yang dibutuhkan juga mengalami kekurangan, fasilitas di Kabupaten Wonosobo memang membutuhkan anggaran yang sedikit lebih karena Kabupaten Wonosobo berada di daerah pegunungan sehingga memiliki rekayasa jaringan yang kompleks dan riskan petir.
 4. Lingkungan ekonomi, PAD kabupaten Wonosobo yang tergolong rendah, yang menjadikan salah satu sumber dari APBD di Kabupaten Wonosobo terlebih APBD 2014 kali ini diprioritaskan untuk penanggulangan orang miskin dan pelayanan sosial.
 5. Lingkungan Sosial, kurangnya sosialisasi membuat masyarakat telat bahkan tidak tahu mengenai adanya *website* di Kabupaten Wonosobo. Masyarakat di kabupaten Wonosobo sebagian masih ada yang belum bisa menggunakan komputer dan internet, yang sudah terbiasa menggunakan internet bahkan lebih suka untuk membuka akun sosial media dari pada *website* Kabupaten Wonosobo. Ditemukannya *website* saingan yang lebih interaktif di kalangan masyarakat karena memiliki akun di sosial media *facebook* dan *twitter*.

6. Disposisi Implementor, kurangnya komitmen para implementor untuk menyelesaikan masalah yang ada pada proses implementasi.

3.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti memberikan beberapa rekomendasi antara lain :

1. Penambahan sumberdaya manusia atau staff-staff yang berkompeten didalam menangani implementasi *e-government* ini. Dengan cara jika ada *rolling* pegawai negeri, Humas Setda Kabupaten Wonosobo di berikan orang-orang terbaik untuk implementasikan kebijakan ini. Paling tidak menggunakan jasa *outsorching* yang benar-benar serius dan mumpuni, selain itu sumberdaya juga mempengaruhi kepada disposisi implementor, jika nanti sumberdaya manusianya mumpuni, kemungkinan nanti disposisi implementornya bagaimana bisa berkomitmen dalam kebijakan ini, setelah itu jika ada permasalahan di dalam pengimplementasian *e-gov* cepat teratasi.
2. Penambahan APBD untuk alokasi anggaran *e-gov* supaya bisa meng-cover kebutuhan fasilitas dalam implementasi *e-gov* ini, bisa dengan cara mengajukan anggaran pada tahun besok. Fasilitas disini salah satunya bisa melakukan antisipasi petir dengan memasang anti petir di setiap sisi jaringan yang rawan petir.
3. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat lebih tahu tentang kebijakan ini terlebih melalui media sosial, dan diruang-ruang publik yang banyak orang bisa membacanya. Seperti menggunakan baliho atau sekedar menempelkan brosur pada warnet-warnet yang ada di sekitar Kabupaten Wonosobo.
4. Meningkatkan komitmen dari implementor untuk melaksanakan kebijakani ni. Dengan setiap pertemuan / evaluasi lebih menjelaskan detail tentang pentingnya kebijakan ini.
5. Membuat akun sosial media, menurut peneliti sekarang masyarakat masih digandrungi dengan sosial media seperti *facebook* dan *twitter* dan peneliti melihat bahwa potensi mengenalkan *website* lebih mendukung. Banyak akun-akun *twitter* yang bertemakan KabupatenWonosobo , namun itu bukan milik resmi Pemerintah KabupatenWonosobo. Bisa dilakukan kerjasama atau membuat akun sendiri yang nantinya bisa memuat informasi-informasi mengenai KabupatenWonosobo ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Agustino,Leo . (2006) . *Dasar- Dasar Kebijakan Publik* . Bandung : Alfabeta

Akadun (2009). *Teknologi Informasi Administrasi*. Jakarta:Alfabeta

Dunn, William N . (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Edisi Kedua)* . Yogyakarta : Gadjah Mada University Press

Syafiie, Inu Kencana. (2006). *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta : PT Rineka Cipta.

Indrajit, Richardus Eko.(2004). *Electronic Government Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*.Jakarta:Andi Yogyakarta.

Moleong, Lexy J. (2005). *Metologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : remaja Rosda Karya

Mufiz, Ali. (2004) *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*.Jakarta: Buku Materi Pokok

Nugroho, Riant. (2009) .*Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo

Nogi, Hessel. (2003). *Implementasi Kebijakan George Edward* . Yogyakarta : Lukman Offset

Subarsono.(2006). *Analisis Kebijakan Publik : Konsep,Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Sugiyono.(2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta

Suwitri,Sri . (2011) . *Konsep Dasar Kebijakan Publik* . Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Syahriani , dan Syakrani. (2009). *Implementasi Otonomi Daerah dalam Perspektif Good Governance*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar

Winarno, Budi. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Wordpress.

Winarno, Budi. (2007). *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Presindo.

Peraturan Perundang-undangan :

Inpres No 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan e-Government

UU no 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

UU RI No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah

Undang-Undang no 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

28/PER/M/KOMINFO/09/2006 Tentang Penggunaan Nama Domain go.id

Skripsi :

Hasanawati, Mira. (2012). IMPLEMENTASI e-KTP DI KECAMATAN BAROS
KABUPATEN SERANG. *Skripsi* pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
Diunduh pada 11 11 2012 pukul 17.00 (<http://repository.fisip-untirta.ac.id/40/>)

Sumber lain :

<Referensi: <http://kamusbahasaIndonesia.org/kebijakan#ixzz2EhvfHypO> diakses
tanggal 11 12 2012 pukul 09.44>

<<http://noorindahsari.blogspot.com/2011/04/pengertian-otonomi-sistem-otonomo-dan.html> > diunduh tanggal 11 11 2012 pukul 13.00 Pengertian Otonomi, Sistem Otonomo, dan Sistem Pemerintahan Daerah Menurut Ahli

www.kominfo.go.id diakses pada 13 11 2012 pukul 13.00

Pengertian Kebijakan Publik
http://pap.diklat.dephub.go.id/eperpustakaan/index.php?p=show_detail&id=619

www.wonosobokab.go.id

www.ewonosobo.com

www.facebook.com/ewonosobo